

## Analisis Wacana Kekuasaan dalam Pemberitaan Lomba Cerdas Cermat MPR Perspektif Michel Foucault

M. Sabiq Ibnu Syarif<sup>1</sup>, Zidan Ibnu Hayyi<sup>2</sup>, Rifma Ghulam Dzaljad<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. Indonesia

Corresponding Author's: [sabiqibnu69@gmail.com](mailto:sabiqibnu69@gmail.com), [Zidanibnuhayyi12@gmail.com](mailto:Zidanibnuhayyi12@gmail.com),  
[rifmaghulam@uhamka.ac.id](mailto:rifmaghulam@uhamka.ac.id)

e-ISSN: 2985-7996

### Article History:

Received: 04-10-2025

Accepted: 29-10-2025

© 2025, The Author(s)

**Abstrak** : Kontroversi Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat pada Mei 2026 menjadi perhatian publik setelah dewan juri memberikan nilai minus lima kepada peserta yang menjawab benar dengan alasan artikulasi kurang jelas, sementara peserta lain yang memberikan jawaban serupa memperoleh nilai sempurna. Perbedaan perlakuan tersebut memunculkan perdebatan mengenai objektivitas penilaian, relasi kuasa, dan mekanisme evaluasi dalam kompetisi pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi kekuasaan dalam pemberitaan media mengenai kontroversi tersebut menggunakan perspektif analisis wacana Michel Foucault. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis terhadap teks berita yang dipublikasikan oleh Kompas.com dan ANTARA News. Data dianalisis melalui identifikasi konstruksi wacana, relasi pengetahuan dan kekuasaan, serta praktik pendisiplinan yang direpresentasikan dalam pemberitaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media membingkai dewan juri sebagai representasi regime of truth yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan kebenaran melalui proses penilaian. Pemberian nilai minus direpresentasikan sebagai bentuk hukuman simbolik yang berpotensi membatasi keberanian peserta untuk mempertanyakan keputusan juri, sedangkan ketiadaan mekanisme banding mencerminkan praktik pengawasan yang menyerupai konsep panopticon, di mana peserta berada dalam posisi yang tidak memiliki ruang untuk mengoreksi otoritas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontroversi tersebut tidak hanya mencerminkan persoalan teknis dalam sistem penilaian, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan struktural mengenai relasi kekuasaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kompetisi pendidikan.

**Kata kunci**: analisis wacana, Michel Foucault, kekuasaan, pemberitaan, LCC MPR



## PENDAHULUAN

Kasus kekerasan simbolik dalam dunia pendidikan Indonesia bukan hal baru. Guru yang menghukum murid karena bertanya, dosen yang menilai mahasiswa berdasarkan kedekatan personal, atau juri lomba yang bertindak sewenang-wenang semua ini adalah bentuk kekuasaan yang bekerja secara halus namun nyata. Salah satu contoh terbaru adalah kontroversi Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat pada Mei 2026 yang viral di media sosial dan mendapat perhatian luas dari publik.

Kontroversi ini berawal dari kejadian sederhana namun mengundang banyak pertanyaan. Seorang peserta dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan tentang mekanisme pemilihan anggota BPK dengan benar. Namun dewan juri yang dipimpin oleh Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dyastasisita Widya Budi, memberikan nilai minus lima. Alasan juri: artikulasi peserta kurang jelas. Sementara itu, tim lain dari SMAN 1 Sambas mendapat pertanyaan yang sama dan memberikan jawaban yang sama persis, namun mendapat nilai sepuluh penuh. Ketika tim pertama mencoba protes, protes mereka tidak digubris dan pembawa acara justru memperkuat posisi juri.

Yang membuat kasus ini semakin menarik adalah posisi juri yang merupakan aparatur negara, sementara peserta adalah siswa SMA yang secara hierarkis berada di posisi lebih rendah. Ketimpangan relasi kuasa ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Media massa seperti Kompas.com dan ANTARA News memberitakan kasus ini secara intensif dan menjadi ruang publik di mana wacana tentang kekuasaan, keadilan, dan otoritas diperdebatkan.

Berdasarkan pemberitaan media, ada beberapa fakta penting yang muncul dari kasus ini. Pertama, juri lomba adalah Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI yang memiliki jabatan struktural di lembaga negara, sementara peserta adalah siswa SMA yang masih duduk di bangku sekolah. Kedua, alasan yang digunakan juri untuk memberikan nilai minus "artikulasi kurang jelas" bersifat subjektif dan tidak memiliki standar pengukuran yang jelas dalam aturan lomba. Ketiga, tidak ada mekanisme banding yang memungkinkan peserta mengajukan keberatan atas keputusan juri, sehingga keputusan juri bersifat final dan mutlak. Keempat, permintaan maaf dan evaluasi sistem penjurian baru dilakukan setelah kasus ini viral di media sosial dan mendapat tekanan publik yang masif, bukan karena mekanisme internal yang berjalan dengan baik.

Pemberitaan kasus ini berlangsung intens selama periode 12 hingga 15 Mei 2026. Media memberitakan kronologi kejadian, reaksi publik, tanggapan dari MPR RI, hingga keputusan untuk mengulang final lomba dengan juri independen. Dari sini terlihat bahwa media memainkan peran penting dalam mengangkat isu ini ke permukaan dan mendorong perubahan dari institusi yang berwenang.

Penelitian tentang kekuasaan dalam dunia pendidikan sebenarnya sudah banyak dilakukan. Namun sebagian besar masih fokus pada kekerasan fisik, diskriminasi struktural, atau ketimpangan akses pendidikan. Penelitian yang secara spesifik menganalisis representasi kekuasaan dalam pemberitaan media tentang kompetisi akademik masih terbatas.

Beberapa penelitian yang relevan antara lain: Pertama, penelitian tentang analisis wacana kritis dalam pemberitaan pendidikan yang lebih banyak menyoroti kebijakan pendidikan daripada praktik kekuasaan di level mikro seperti lomba atau kompetisi. Kedua, penelitian tentang kekuasaan dalam dunia pendidikan yang lebih banyak menggunakan perspektif Bourdieu tentang habitus dan modal budaya, bukan Foucault tentang rezim kebenaran dan disiplin.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana media massa merepresentasikan kekuasaan juri dalam pemberitaan kontroversi LCC MPR menggunakan perspektif analisis wacana Michel Foucault. Kebaruan penelitian ini terletak pada objek kajiannya (pemberitaan kontroversi LCC MPR yang masih baru terjadi) dan pisau analisisnya (konsep rezim kebenaran, disiplin, dan panoptikon dari Foucault).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis yang berlandaskan perspektif kekuasaan Michel Foucault. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap bagaimana relasi kuasa, pengetahuan, dan praktik diskursif dikonstruksi serta direpresentasikan dalam teks media. Analisis wacana Foucault memandang bahasa tidak sekadar sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai instrumen yang membentuk, mereproduksi, dan melegitimasi kekuasaan melalui praktik diskursif yang berkembang dalam masyarakat (Arribas-Ayllon & Walkerdine, 2023; Kendall & Wickham, 2022). Dengan pendekatan tersebut, penelitian berupaya menjelaskan bagaimana pemberitaan media membangun representasi mengenai otoritas, kebenaran, dan mekanisme pendisiplinan dalam kontroversi Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis wacana berbasis konsep *power/knowledge*, *regime of truth*, *disciplinary power*, dan *panopticon* yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Analisis dilakukan secara interpretatif melalui identifikasi bentuk-bentuk representasi kekuasaan yang muncul dalam teks pemberitaan, kemudian dihubungkan dengan konteks sosial, politik, dan pendidikan yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. Pendekatan ini banyak digunakan dalam penelitian media karena mampu menjelaskan hubungan antara praktik jurnalistik, produksi pengetahuan, dan pembentukan realitas sosial (Hook, 2021; Bacchi & Goodwin, 2022).

Subjek penelitian berupa teks pemberitaan mengenai kontroversi Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang dipublikasikan oleh Kompas.com dan ANTARA News pada Mei 2026. Kedua media dipilih secara purposif karena memiliki intensitas pemberitaan yang tinggi, menyajikan kronologi peristiwa secara komprehensif, serta memuat berbagai perspektif dari pihak peserta, dewan juri, MPR RI, dan organisasi pendidikan. Unit analisis penelitian adalah narasi, kutipan, pilihan diksi, serta konstruksi wacana yang menggambarkan relasi kekuasaan dalam proses penilaian lomba.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa lima teks berita yang membahas kontroversi penilaian Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI dari Kompas.com dan ANTARA News sebagaimana menjadi objek analisis penelitian. Data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, buku akademik, serta publikasi ilmiah yang membahas teori kekuasaan Michel Foucault, analisis wacana kritis, studi media, dan komunikasi politik sebagai landasan konseptual penelitian. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan memperkuat interpretasi sekaligus meningkatkan validitas analisis melalui triangulasi teori dan sumber ilmiah (Wodak & Meyer, 2022; Fairclough, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan seluruh teks berita yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan proses reduksi data, pengkodean tema, dan kategorisasi berdasarkan konsep-konsep utama Foucault, yaitu *regime of truth*, *disciplinary power*, dan *panopticon*. Seluruh proses analisis dilakukan

secara sistematis dengan membandingkan representasi yang muncul antarteks sehingga diperoleh pola wacana yang konsisten mengenai praktik kekuasaan dalam pemberitaan media.

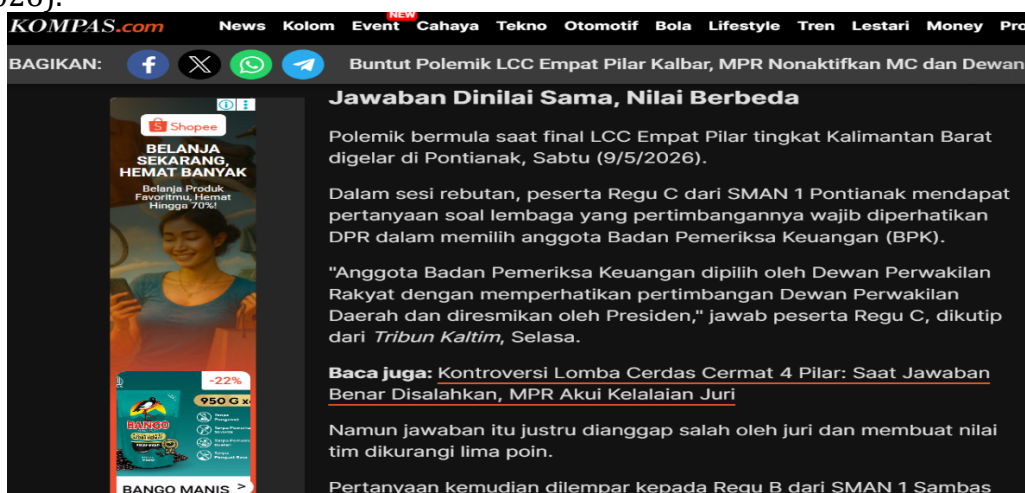
Analisis data dilakukan melalui tahapan membaca secara mendalam teks berita, mengidentifikasi bentuk-bentuk representasi kekuasaan, menginterpretasikan hubungan antara bahasa, pengetahuan, dan otoritas, serta menarik makna berdasarkan kerangka teori Michel Foucault. Validitas penelitian diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori dengan membandingkan hasil interpretasi antarteks serta mengaitkannya dengan kajian ilmiah mengenai analisis wacana dan relasi kuasa dalam media massa. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana media membentuk konstruksi kekuasaan dalam pemberitaan kontroversi Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kronologi dalam Pemberitaan

Dari keempat berita yang dianalisis, kronologi kejadiannya kurang lebih begini. Seorang peserta dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan tentang mekanisme pemilihan anggota BPK dengan benar. Tapi dewan juri yang dipimpin Dyastasisa Widya Budi memberikan nilai minus lima. Alasannya, artikulasi peserta kurang jelas. Tim dari SMAN 1 Sambas kemudian mendapat pertanyaan yang sama dan memberikan jawaban yang identik. Kali ini juri memberikan nilai sepuluh. Peserta dari SMAN 1 Pontianak protes karena jawaban mereka sama, tapi protesnya tidak direspons. Pembawa acara malah memperkuat posisi juri.

Setelah viral dan mendapat tekanan publik, MPR RI meminta maaf dan berjanji mengevaluasi sistem penjurian. Ketua MPR Ahmad Muzani memutuskan untuk mengulang final lomba dengan juri independen (ANTARA News, 13 Mei 2026). Namun SMAN 1 Pontianak menolak ikut final ulang karena mereka merasa sudah dirugikan dan protes mereka bukan untuk membatalkan hasil (Kompas.com, 15 Mei 2026). Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga mengkritik kebijakan MPR yang dinilai lebih menyelamatkan citra daripada memperjuangkan keadilan bagi peserta (Kompas.com, 14 Mei 2026).



(Gambar 1. Screenshot pemberitaan Kompas.com tentang kronologi kontroversi nilai minus lima (Sumber: Kompas.com, 12 Mei 2026)

### Analisis 1: Representasi Rezim Kebenaran dalam Pemberitaan

Foucault (2017) menjelaskan bahwa setiap masyarakat memiliki "rezim kebenaran" masing-masing. Rezim kebenaran adalah aturan tidak tertulis tentang apa

yang dianggap benar, siapa yang berhak menentukan benar salah, dan bagaimana cara mendapatkan kebenaran. Dalam pemberitaan LCC MPR, juri digambarkan sebagai rezim kebenaran itu sendiri.

Kutipan dari teks berita: "Jawaban peserta SMAN 1 Pontianak sebenarnya benar secara substansi. Namun dewan juri tetap memberikan nilai minus lima dengan alasan artikulasi peserta kurang jelas." (Kompas.com, 12 Mei 2026)

Analisis kutipan: Kalimat di atas menunjukkan bahwa media menuliskan dua hal yang bertentangan dalam satu peristiwa. Di satu sisi, media mengakui bahwa jawaban peserta "benar secara substansi." Namun di sisi lain, media memberitakan bahwa juri tetap memberikan nilai minus karena alasan yang subjektif: "artikulasi kurang jelas." Media tidak menuliskan bahwa ada standar baku atau kriteria terukur tentang apa yang dimaksud dengan artikulasi yang baik. Media hanya menulis bahwa juri berhak menentukan sendiri apa yang dianggap benar atau salah.

Yang lebih menarik, ketika pertanyaan yang sama diberikan kepada tim lain dan mereka memberikan jawaban yang sama persis, juri memberikan nilai sepuluh. Ini menunjukkan bahwa dalam pemberitaan, kebenaran tidak ditentukan oleh substansi jawaban, tetapi oleh faktor lain di luar kendali peserta: siapa yang mengucapkan dan bagaimana cara mengucapkannya. Juri adalah pihak yang berwenang mutlak untuk menentukan itu. Media menggambarkan juri sebagai "pemegang kebenaran" yang tidak bisa diganggu gugat oleh peserta.

Hal ini sejalan dengan konsep Foucault tentang rezim kebenaran: kebenaran tidak lahir dari fakta objektif, melainkan dari institusi dan mekanisme yang berwenang mendefinisikannya. Dalam kasus ini, juri yang berasal dari MPR RI adalah institusi yang berwenang. Mereka bisa mendefinisikan "artikulasi yang baik" sesuka mereka. Peserta yang mencoba mengklarifikasi justru diabaikan, karena dalam rezim kebenaran ini, peserta tidak punya hak untuk bertanya atau mengoreksi. Peserta hanya menjadi objek yang harus menerima keputusan juri.

## **Analisis 2: Representasi Disiplin dan Hukuman Simbolik**

Konsep kedua Foucault adalah disiplin. Foucault (1977) menjelaskan bahwa kekuasaan modern bekerja secara halus melalui mekanisme disiplin pengawasan, normalisasi, dan sistem penghargaan serta hukuman. Tujuannya adalah membentuk individu yang patuh, yang dalam istilah Foucault disebut "tubuh-tubuh yang patuh."

Kutipan dari teks berita: "FSGI menilai kebijakan MPR mengulang final lomba terkesan menyelamatkan diri. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kasus ini menjadi pelajaran bahwa anak-anak tidak boleh menjadi korban kebijakan yang tidak adil." (Kompas.com, 14 Mei 2026)

Analisis kutipan: Kutipan di atas menunjukkan bahwa FSGI sebagai organisasi guru menyoroti bahwa peserta didik menjadi "korban kebijakan yang tidak adil." Ini menarik karena menunjukkan bahwa hukuman simbolik (nilai minus) yang diberikan juri tidak hanya merugikan peserta secara nilai, tetapi juga secara psikologis dan moral. Peserta yang dirugikan tidak mendapatkan keadilan, sementara institusi (MPR) lebih sibuk menyelamatkan citra daripada memperjuangkan hak peserta.

Pemberitaan ini juga menggambarkan efek dari hukuman simbolik. Ketika peserta mendapat nilai minus karena alasan subjektif, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima. Tidak ada mekanisme banding, tidak ada saluran protes, tidak ada cara untuk mengklarifikasi. Dalam situasi seperti ini, peserta dan peserta lain yang menyaksikan akan belajar bahwa protes tidak berguna. Mereka akan memilih diam.

Menurut Foucault, disiplin bekerja dengan cara membuat orang mengatur perilaku mereka sendiri karena takut dihukum. Dalam pemberitaan, ini tergambar dari

narasi bahwa peserta "dirugikan" tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka belajar bahwa otoritas juri tidak bisa diganggu gugat dan lebih baik diam daripada protes. Inilah yang dimaksud Foucault sebagai pembentukan individu yang patuh.



(Gambar 2. Screenshot pernyataan resmi MPR RI di Instagram @mprgoid (Sumber: Instagram @mprgoid, 12 Mei 2026)

### Analisis 3: Representasi Panoptikon dalam Pemberitaan

Panoptikon adalah desain penjara abad 19 dengan menara pengawas di tengah. Tahanan tidak tahu kapan mereka diawasi, sehingga mereka mengawasi diri sendiri (Foucault, 1977). Foucault menggunakan konsep ini untuk menggambarkan kekuasaan modern yang bekerja bukan dengan kekerasan, tapi dengan rasa takut yang tidak terlihat.

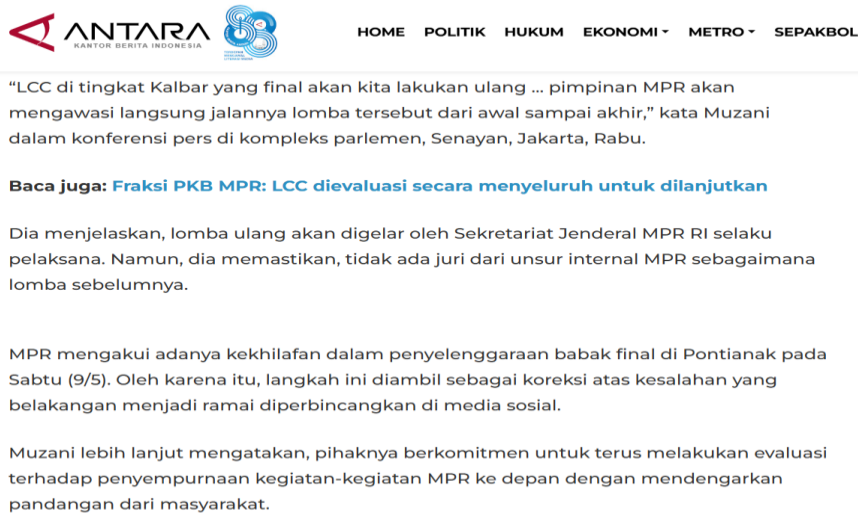
Kutipan dari teks berita: "Protes dari SMAN 1 Pontianak tidak digubris oleh dewan juri. Tidak ada mekanisme banding yang tersedia bagi peserta untuk mengajukan keberatan. Akhirnya, SMAN 1 Pontianak memutuskan menolak ikut final ulang yang ditawarkan MPR." (Kompas.com, 15 Mei 2026)

Analisis kutipan: Kutipan di atas menunjukkan bahwa peserta tidak memiliki saluran untuk protes atau mengajukan keberatan secara resmi. Mereka tidak bisa meminta evaluasi ulang, tidak bisa meminta klarifikasi dari juri, tidak bisa mengajukan banding. Keputusan juri bersifat final dan mutlak. Akhirnya, satu-satunya cara peserta mengekspresikan ketidakpuasan adalah dengan menolak ikut final ulang sebuah tindakan yang sebenarnya juga merugikan mereka sendiri.

Ini adalah representasi dari situasi panoptikon. Peserta merasa selalu diawasi oleh juri, tapi mereka tidak tahu kriteria apa yang digunakan. Mereka hanya tahu bahwa setiap kata, setiap intonasi suara, bisa menjadi alasan untuk dihukum. Akibatnya, peserta akan berbicara dengan hati-hati, takut salah, dan takut dianggap artikulasinya kurang jelas. Mereka tidak akan berani protes meskipun merasa dirugikan karena tidak ada saluran untuk protes.

Foucault mengajarkan bahwa kekuasaan paling efektif adalah yang membuat korban tidak sadar bahwa mereka sedang dikuasai. Dalam pemberitaan, peserta digambarkan seperti ini: mereka tahu mereka dirugikan, tapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak punya pilihan selain diam dan menerima. Bahkan ketika MPR

menawarkan final ulang, peserta memilih menolak karena mereka tidak lagi percaya pada sistem. Ini menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme banding tidak hanya merugikan peserta secara langsung, tetapi juga merusak kepercayaan mereka terhadap institusi.



**Gambar 3.** Screenshot pernyataan Ketua MPR Ahmad Muzani di ANTARA News (Sumber: ANTARA News, 13 Mei 2026)

### Ringkasan Hasil Analisis

Dari analisis terhadap 4 berita menggunakan 3 konsep Foucault, dapat diringkas bahwa pemberitaan LCC MPR merepresentasikan kekuasaan sebagai sesuatu yang absolut dan tidak bisa diganggu gugat. Juri digambarkan sebagai rezim kebenaran yang berkuasa mutlak. Nilai minus direpresentasikan sebagai hukuman simbolik yang mendisiplinkan peserta. Tidak adanya mekanisme banding digambarkan menciptakan situasi panoptikon di mana peserta merasa selalu diawasi dan tidak punya pilihan selain tunduk.

Yang menarik, pemberitaan juga menggambarkan bahwa kekuasaan tidak sepenuhnya kebal terhadap kritik. Setelah tekanan publik melalui media sosial, MPR meminta maaf dan mengulang lomba dengan juri independen. Namun perubahan yang digambarkan media bersifat reaktif, baru terjadi setelah krisis viral, bukan karena mekanisme internal yang berjalan dengan baik.

### KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pemberitaan kontroversi LCC MPR Kalimantan Barat menggunakan teori Foucault, ada tiga kesimpulan utama. Pertama, pemberitaan merepresentasikan juri sebagai "rezim kebenaran" yang menentukan benar salah secara mutlak. Media menulis bahwa jawaban peserta benar secara substansi, tapi juri tetap memberi nilai minus karena alasan subjektif. Ini menunjukkan bahwa kebenaran dalam pemberitaan tidak objektif, tapi ditentukan oleh siapa yang berkuasa.

Kedua, nilai minus direpresentasikan sebagai "hukuman simbolik" yang berfungsi sebagai alat disiplin. Pemberitaan menggambarkan peserta yang dirugikan tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima. Efeknya, peserta dan publik belajar bahwa protes tidak berguna dan lebih baik diam. Ini sejalan dengan konsep Foucault tentang disiplin yang membentuk individu patuh. Ketiga, tidak adanya mekanisme banding digambarkan menciptakan situasi panoptikon. Peserta merasa selalu diawasi dan tidak bisa melawan. Tidak ada saluran protes. Keputusan juri final dan mutlak. Ini membuat peserta menyesuaikan perilaku dan memilih tunduk daripada dihukum.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontroversi LCC MPR bukan cuma kesalahan teknis tapi masalah struktural dalam pendidikan Indonesia. Media melalui pemberitaannya berperan dalam merepresentasikan dan memperkuat narasi kekuasaan yang absolut. Penelitian ini merekomendasikan reformasi sistem penilaian kompetensi akademik dengan standar yang jelas, mekanisme banding, dan pelatihan etika bagi juri. Pendidikan yang baik bukan yang menuntut kepatuhan mutlak, tapi yang melahirkan generasi kritis yang berani bertanya, mengklarifikasi, dan menyampaikan kebenaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA News Kalimantan Barat. (2026, May 13). *MPR ulang final LCC Empat Pilar Kalbar dan ganti juri*. <https://kalbar.antaranews.com/berita/700516/mpr-ulang-final-lcc-empat-pilar-kalbar-dan-ganti-juri>
- ANTARA News Kalimantan Barat. (2026, May 13). *Sekjen MPR bantah juri LCC Empat Pilar Kalbar berpihak*. <https://kalbar.antaranews.com/berita/700489/sekjen-mpr-bantah-juri-lcc-empat-pilar-kalbar-berpihak>
- Arribas-Ayllon, M., & Walkerdine, V. (2008). Foucauldian discourse analysis. In C. Willig & W. Stainton-Rogers (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research in psychology* (pp. 91–108). Sage. <https://doi.org/10.4135/9781848607927.n6>
- Creswell, J. W. (2012). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Pantheon Books.
- Foucault, M. (2017). *Power/knowledge: Wacana kuasa/pengetahuan*. Narasi-Pustaka Promothea.
- Khan, T. H., & MacEachen, E. (2021). Foucauldian discourse analysis: Moving beyond a social constructionist analytic. *International Journal of Qualitative Methods*, 20, 1–9. <https://doi.org/10.1177/16094069211018009>
- Kompas.com. (2026, May 12). *Buntut polemik LCC Empat Pilar Kalbar, MPR nonaktifkan MC dan dewan juri*. <https://regional.kompas.com/read/2026/05/12/193800578/buntut-polemik-lcc-empat-pilar-kalbar-mpr-nonaktifkan-mc-dan-dewan-juri>
- Kompas.com. (2026, May 14). *FSGI sentil MPR soal final ulang LCC: Terkesan menyelamatkan, tapi anak jadi korban kebijakan*. [https://regional.kompas.com/read/2026/05/14/155816578/fsgi-sentil-mpr-soal-final-ulang-lcc-terkesan-menyelamatkan-tapi-anak-jadi](https://regional.kompas.com/read/2026/05/14/155816578/fsgi-sentil-mpr-soal-final-ulang-lcc-terkesan-menyelamatkan-tapi-anak-jadi-korban-kebijakan)
- Kompas.com. (2026, May 15). *Pimpinan MPR sudah terima penolakan SMAN 1 Pontianak soal final lomba cerdas cermat diulang*. <https://regional.kompas.com/read/2026/05/15/105815578/pimpinan-mpr-sudah-terima-penolakan-sman-1-pontianak-soal-final-lomba>
- Ong, S. H., Beaumont, M., Caine, V., & Slemon, A. (2024). Selecting approaches for discourse analysis: Thoughts on nursing research. *International Journal of Qualitative Methods*, 23. <https://doi.org/10.1177/16094069241299658>
- Palm, F. (2023). Addiction phobia: Foucault, abstract governance, and the fascination with materiality in contemporary critical studies of addiction. *NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research*, 31(4), 488–507. <https://doi.org/10.1080/1600910X.2023.2235907>
- Phillips, M. J. (2023). Towards a social constructionist, criticalist, Foucauldian-informed qualitative research approach: Opportunities and challenges. *SN Social Sciences*, 3, Article 175. <https://doi.org/10.1007/s43545-023-00774-9>

Shirazi, M. R. (2023). Discourse studies and urban research: Methodological challenges, achievements, and future prospects. *Urban Science*, 7(2), Article 42. <https://doi.org/10.3390/urbansci7020042>